**PROGRAM HUMAS DINAS KOMINFO DAN KEHUMASAN PEMPROV DKI JAKARTA DALAM MEMONITORING BERITA**

**Fifit Fitriansyah1** , **Yulia Anggraini Dwikaputri2**

12Fakultas Komunikasi dan Bahasa Universitas Bina Sarana Informatika

e-mail: fifit.ffy@bsi.ac.id

**ABSTRAKSI**

Pentingnya menjaga komunikasi eksternal dan internal dalam menumbuhkan kepercayaan publik kerap disadari oleh humas Pemprov DKI Jakarta, beberapa media lokal maupun nasional merupakan mitra Pemprov DKI Jakarta dalam mampublikasikan informasi-informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Pemprov DKI Jakarta kepada publik nasional maupun publik Jakarta khususnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana program Humas Dinas Komunikasi Informatika Dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta Dalam Memonitoring Berita Di Wilayah DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggambarkan situasi dan keaadaan yang dijalankan sesuai dengan kondisi apa adanya. Hasil dari penelitian ini adalah program yang dijalankan Humas dalam melakukan monitor terhadap pemberitaan dalam media dilakukan dengan menggunakan pendekatan praktis dalam memonitor media. Salah satu teknik yang paling terkenal, namun sudah jadul, adalah *clip counting* atau kliping. Untuk mengetahui puas atau tidak publik kepada Pemprov DKI Jakarta, Humas DKI sangat berperan penting untuk menginformasikan dan menanggapi pemberitaan yang ada di Pemprov DKI Jakarta melalui media.

**Keyword: Program Humas, Media Monitoring, Berita**

***ABSTRACT***

*The importance of maintaining external and internal communication in growing public trust is often realized by the public relations of the DKI Jakarta Provincial Government, several local and national media are partners of the DKI Jakarta Provincial Government in publishing information about everything related to the DKI Jakarta Provincial Government to the national public and the Jakarta public in particular. The purpose of this study was to find out how the Public Relations program of the Department of Communication Informatics and Public Relations of the DKI Jakarta Provincial Government in Monitoring News in the DKI Jakarta Region. The method used in this study is a descriptive qualitative method by describing the situation and conditions that are carried out according to the conditions as they are. The result of this research is that the program run by Public Relations in monitoring the news in the media is carried out using a practical approach in monitoring the media. One of the most well-known, but outdated, techniques is clip counting. To find out whether the public is satisfied or not with the DKI Jakarta Provincial Government, DKI Public Relations plays an important role in informing and responding to news in the DKI Jakarta Provincial Government through the media.*

***Keyword: Humas Programe, Monitoring Media, News***

**PENDAHULUAN**

Istilah media monitoring seringkali didengar. Penggunaan istilah ini biasanya digunakan para penggiat komunikasi. Tidak ada istilah baku tentang definisi media monitoring. Secara sederhana media monitoring adalah kegiatan pemantauan atau pengawasan media massa, cetak, televisi, radio, maupun daring (on line).

Dalam sejumlah artikel dijelaskan bahwa media monitoring adalah sebuah rangkain dari proses membaca, melihat, mencatat, dan mendengar isi dari sebuah artikel, berita atau naskah berita, dan iklan media massa. Proses ini dilakukan terus menerus. Kemudian melakukan indentifikasi, analisa, serta menyimpannya menjadi sejumlah topik, tema, ataupun kata kunci yang telah ditentukan (*keyword*). Tujuan dilakukan media monitoring untuk mendeteksi dan mengantisipasi secara dini isi dari sebuah artikel, berita atau naskah berita, dan iklan media massa. Dimana isinya berkaitan dengan sebuah peristiwa, menyangkut siapa, mengapa bisa terjadi, sumberdaya publik yang berkaitan, kebijakan, dan dampak apa yang terjadi atau harus diantisipasi serta hal lainnya.

Bentuk media monitoring ada tiga macam. *Media clipping*, *media tracking*, dan *media content analyis*. *Media clipping* adalah dokumentasi berupa artikel, naskah berita, dan iklan media massa. Bentuknya dapat berupa teks dan video. *Media tracking* adalah untuk melacak jejak opini publik atas suatu kejadian (events) tertentu atau isu-isu tertentu pada media massa. *Media content analysis* atau analisis isi adalah suatu metode untuk menganalisis isi sebuah“teks”. Pendekatan metode ini adalah kuantitatif: teks ditafsirkan dalam unit analisis yang bisa dihitung. Analisis ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman struktur makna sebuah teks secara konsisten. Metode ini banyak diterapkan untuk analisis teks dalam media.

Saat ini, media monitoring kerap diterjemahkan sebagai sebuah layanan pemantauan media. Banyak perusahaan, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau lembaga nirlaba menggunakan media monitoring sebagai suatu alat untuk mendeteksi sebuah artikel, berita atau naskah berita, dan iklan media massa yang isinya menyebut nama mereka atau organisasi mereka.

Ada juga beberapa organisasi menggunakan media monitoring untuk mengetahui informasi apa saja yang telah dipublikasikan media tentang mereka, ada juga untuk mengumpulkan informasi apa saja yang berkaitan pesaing mereka, ada juga untuk mengintip isu apa saja yang digunakan para pesaing mereka, untuk mengatur citra, untuk bisnis yang berkaitan dengan intelijen, untuk mengenali apa saja kelemahan dan kekuatan dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi, atau untuk mengidentifikasi peluang bisnis baru, dan lainnya.

Figur seorang humas dalam sebuah organisasi amatlah penting,karena antara instansi pemerintah dengan publik sangat berkaitan dengankomunikasi. Tugas seorang humas pada khususnya mempertahankan bahkan meningkatkan citra dari suatu instansi. Citra instansi merupakan kesan, pandanganatau persepsi seseorangterhadap instansi tersebut, berbagai cara dapat dilakukanoleh seorang humas untuk memperoleh kepercayaan dari unsur-unsuryang menjadi ruang lingkup eksternal, salah satunya adalah denganmelakukan kegiatan atau aktivitas komunikasi eksternal khususnya yang berhubungan dengan media, baik itu cetak maupun noncetak yang dikenal dengan sebutan media relations.

Untuk mengetahui puas atau tidak publik kepada Pemprov DKI Jakarta, Humas DKI sangat berperan penting untuk menginformasikan dan menanggapi pemberitaan yang ada di Pemprov DKI Jakarta melalui media.

Pentingnya menjaga komunikasi eksternal dan internal dalammenumbuhkan kepercayaan publik kerap disadari oleh humas Pemprov DKI Jakarta, beberapa media lokal maupun nasional merupakan mitra Pemprov DKI Jakarta dalam mampublikasikan informasi-informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Pemprov DKI Jakarta kepada publik nasional maupun publik Jakarta khususnya. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta dengan judul laporan “Program Humas Dinas Komunikasi Informatika Dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta Dalam Memonitoring Berita Di Wilayah DKI Jakarta”.

**METODOLOGI**

Dalam memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan beberapa teknk dalam pengumpulan datanya untuk menghasilkan data yang menunjang penulisan laporan praktikum terpadu ini.

 Menurut Kriyanto (2010:95) “Metode Pengumpulan Data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data.”

1. **Observasi** yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian (Fitriansyah & Aryadillah, 2020).Penulis dalam melakukan penelitian terjun langsung dalam program humas Dinas Komunikasi Informatika Dan Kehumasan Pemprov Dki Jakarta.
2. **Studi Kepustakaan** digunakan sebagai sumber pendukung dalam enelitian. Peneliti melakukan studi pustaka dengan membaca sebanyak-banyaknya informasi dari berbagai sumber data tertulis yang memberikan informasi tentang penelitian yang dilakukan.
3. **Dokumentasi;** Menurut Guba dan Lincoln dalam meleong (2007:216) mendefinisikan “Dokumentasi ialah setiap bahan tetulis ataupun film, selain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seseorang penyidik”.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Profil Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta**

Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2009 adalah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang bertugas melaksanakan urusan komunikasi dan informatika. Dalam pelaksanaan kedudukan tersebut, Dinas Kominfomas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Dinas Kominfomas yang dipimpin oleh Kepada Dinas Kominfomas dilengkapi dengan perangkat-perangkat organisasi sebagai berikut:

1. Sekretariat,
2. Bidang Media Massa,
3. Bidang Informasi Publik,
4. Bidang Infrastruktur Perangkat Lunak,
5. Bidang Sistem Informasi Manajemen,
6. Bidang Infrastruktur Perangkat Keras,
7. Bidang Pos dan Telekomunikasi,
8. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Kota Administrasi
9. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Kabupaten Administras
10. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
11. Sekretariat Komisi Informasi Provinsi (KIP)
12. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)

**Kedudukan Humas dalam Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta**

Kedudukan Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2009 adalah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang bertugas melaksanakan urusan komunikasi dan informatika. Dalam pelaksanaan kedudukan tersebut, Dinas Kominfomas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Adapun Kepala Seksi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Kasie Kemitraan dan Kerjasama Kehumasan
2. Kasie Dokumentasi dan Publikasi
3. Kasie Analisa dan Monitoring Berita
4. Kasie Informasi Publik
5. Kasie Penerbitan dan Media Luar uang
6. Kasie Data dan Informasi.

**Tugas dan Fungsi Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta**

1. **Tugas Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta**

Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2009 adalah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang bertugas melaksanakan urusan komunikasi dan informatika. Dalam pelaksanaan kedudukan tersebut, Dinas Kominfomas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

1. **Fungsi Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kominfomas memiliki fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dinas komunikasi, informatika, dan kehumasan;
2. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan komunikasi, informatika, dan kehumasan;
3. pelaksanaan kehumasan;
4. pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan teknologi informasi;
5. pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan komunikasi;
6. pembinaan pos dan telekomunikasi;
7. pembinaan, dan pengembangan tenaga fungsional pranata kehumasan dan pranata komputer;
8. pengembangan jejaring kerja kehumasan;
9. publikasi, pelayanan informasi dan pendokumentasian kegiatan kebijakan pemerintah daerah;
10. fasilitasi dan pengoordinasian akses publik terhadap pemerintah daerah;
11. pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan klarifikasi sikap masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah;
12. pengelolaan media cetak dan elektronik;
13. pelayanan, pembinaan, dan pengendalian perizinan dan/atau rekomendasi usaha pos, telekomunikasi dan informatika

Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan 8-9 blok G, Jakarta 10110. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Analisa dan Monitoring Berita, penulis meliput salah satu kegiatan yang akan dijadikan judul laporan Praktikum Terpadu yaitu “Program Humas Dinas Komunikasi Informatika Dan Kehumasan Pemprov Dki Jakarta Dalam Memonitoring Berita Di Wilayah DKI Jakarta”.

 Program yang dibahas pada laporan ini adalah kegiatan yang rutin dilakukan Seksi Analisa dan Monitoring Berita adalah memonitoring berita yang bersangkutan dengan Pemprov DKI Jakarta. Media yang disoroti adalah media cetak, online, dan televisi. Namun penulis membatasi pembahasan monitoring berita melalui media cetak.

**Pelaksanaan Kegiatan**

Monitoring secara generik dapat diartikan sebagai pengawasan atau pemantauan. Istilah ini, sekalipun istilah asing, sudah sering terdengar dalam percakapan publik. Berbagai pihak menggunakannya untuk berbagai peruntukan. Untuk sebuah kerja serius yang coba diangkat program ini, defenisi generik seperti di atas tentu saja tidak memadai. Diperlukan suatu defenisi operasional tentang apa itu monitoring.

Monitoring dilakukan secara terus menerus dan merekam/mencatatnya secara terstruktur.  Motif sebuah kegiatan monitoring didasari oleh keinginan untuk mencari hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa atau kejadian baik menyangkut siapa, mengapa bisa terjadi, sumberdaya publik yang berkaitan, kebijakan dan dampak apa yang terjadi atau harus diantisipasi serta hal-hal lain yang berkaitan.

Dalam program monitoring berita yang dilakukan Seksi Analisa dan Monitoring Berita, setiap harinya berita yang berkaitan dengan seluruh SKPD DKI Jakarta melalui media cetak dibuat sinopsisnya yang kemudian disortir berdasarkan jenis beritanya juga mengidentifikasi untuk menandai apakah berita tersebut bersifat positif atau tidak. Sinopsis berita yang telah dibuat juga akan dikirimkan ke masing-masing SKPD yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti permasalahannya.

 Hasil dari tiap monitoring berita yang dilakukan juga nantinya akan dipublikasi melalui media online <http://www.klipingdigitaljakarta.com/> yang dikelola langsung oleh Dinas Komunikasi Informatika Dan Kehumasan Pemprov Dki Jakarta. Situs web tersebut adalah sebuah kliping digital yang berisikan seluruh sinopsis berita yang telah dimonitoring Seksi Analisa dan Monitoring Berita. Setiap bulannya juga dilampirkan rekapitulasi tonasi pemberitaan tentang Pemprov. DKI Jakarta di media cetak setiap periode perbulannya.

**Evaluasi Kegiatan**

Melakukan monitor terhadap pemberitaan dalam media sangat diperlukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatan informasi dasar yang diperlukan. Ada beberapa pendekatan praktis dalam memonitor media. Salah satu teknik yang paling terkenal, namun sudah jadul, adalah *clip counting* atau kliping. Untuk mengetahui puas atau tidak publik kepada Pemprov DKI Jakarta, Humas DKI sangat berperan penting untuk menginformasikan dan menanggapi pemberitaan yang ada di Pemprov DKI Jakarta melalui media.

Pentingnya menjaga komunikasi eksternal dan internal dalam menumbuhkan kepercayaan publik kerap disadari oleh humas Pemprov DKI Jakarta, beberapa media lokal maupun nasional merupakan mitra Pemprov DKI Jakarta dalam mampublikasikan informasi-informasi tentang segala sesuatu yangberkaitan dengan Pemprov DKI Jakarta kepada publik nasional maupun publik Jakarta khususnya.

Untuk mengetahui puas atau tidak publik kepada Pemprov DKI Jakarta, Humas DKI sangat berperan penting untuk menginformasikan dan menanggapi pemberitaan yang ada di Pemprov DKI Jakarta melalui media. Pentingnya menjaga komunikasi eksternal dan internal dalammenumbuhkan kepercayaan publik kerap disadari oleh humas Pemprov DKI Jakarta, beberapa media lokal maupun nasional merupakan mitra Pemprov DKI Jakarta dalam mampublikasikan informasi-informasi tentang segala sesuatu yangberkaitan dengan Pemprov DKI Jakarta kepada publik nasional maupun publik Jakarta khususnya.

Dalam pelaksanaan program monintoring berita yang dilakukan humas Pemprov DKI Jakarta menemui beberapa kendala, diantaranya berita yang dikirim ke seluruh SKPD DKI Jakarta terkait mengenai berita negatif untuk ditindaklanjuti terkadang tidak secara cepat direspon oleh SKPD terkait. Akibatnya berita negatif yang tersebar akan terus menerus menyebar.

 Pemecahan dalam kendala dalam monintoring berita yang dilakukan humas Pemprov DKI Jakarta adalah biasanya para staff Seksi Analisa dan Monitoring Berita akan terus menerus mem*follow-up* ke SKPD terkait untuk segera mungkin ditidaklanjuti dan dikirim hail tindaklanjut dari berita negatif tersebut.

**KESIMPULAN**

Istilah media monitoring seringkali didengar. Penggunaan istilah ini biasanya digunakan para penggiat komunikasi. Tidak ada istilah baku tentang definisi media monitoring. Secara sederhana media monitoring adalah kegiatan pemantauan atau pengawasan media massa, cetak, televisi, radio, maupun daring (on line).

Bentuk media monitoring ada tiga macam. *Media clipping*, *media tracking*, dan *media content analyis*. *Media clipping* adalah dokumentasi berupa artikel, naskah berita, dan iklan media massa. Bentuknya dapat berupa teks dan video. *Media tracking* adalah untuk melacak jejak opini publik atas suatu kejadian (events) tertentu atau isu-isu tertentu pada media massa. *Media content analysis* atau analisis isi adalah suatu metode untuk menganalisis isi sebuah“teks”. Pendekatan metode ini adalah kuantitatif: teks ditafsirkan dalam unit analisis yang bisa dihitung. Analisis ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman struktur makna sebuah teks secara konsisten. Metode ini banyak diterapkan untuk analisis teks dalam media.

Untuk mengetahui puas atau tidak publik kepada Pemprov DKI Jakarta, Humas DKI sangat berperan penting untuk menginformasikan dan menanggapi pemberitaan yang ada di Pemprov DKI Jakarta melalui media.

Pentingnya menjaga komunikasi eksternal dan internal dalam menumbuhkan kepercayaan publik kerap disadari oleh humas Pemprov DKI Jakarta, beberapa media lokal maupun nasional merupakan mitra Pemprov DKI Jakarta dalam mampublikasikan informasi-informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Pemprov DKI Jakarta kepada publik nasional maupun publik Jakarta khususnya. Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran yaitu, terus meningkatkan kinerja dalam memonitoring seluruh berita yang berkaitan dengan Pemprov DKI Jakarta agar tercipta Jakarta yang bisa lebih baik lagi kedepannya

**REFERENSI**

Ardiantono. Elvinaro. 2008. *Public Relations Praktis.* Widya Padjajaran

Fitriansyah, F., & Aryadillah. (2020). Penggunaan Telegram Sebagai Media Komunikasi Dalam Pembelajaran Online. *Cakrawala*, *20*(2), 111–117.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta

Krosyantomo. Rahmat. 2010. *Tehnik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Praenada Media Group

Ruslan Rosadi. 2005. *Manajemen Relations dan Media Kemunikasi: Konsepsi dan Aplikasi.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Lexy J. Meleong. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya

Soemirat. Soleh. Dan Elvarinaro Ardianto. 2010. *Dasar-Dasar Public Relations: Konsepsi.* Bandung: Remaja Rosdakarya

Jefkins. Frank. 2007. *Public Relations.* Jakarta: Erlangga

Ruslan Rosadi. 2010. *Manajemen Public Relations dan Media Public Relations: Konsepsi dan Aplikasi.* Jakarta: Remaja Rosdakarya

Effendy. Onong Uchjana. 2006. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek.* Bandung: Remaja Rsdakarya

<http://www.jakarta.go.id>

<https://books.google.co.id/>

<http://www.klipingdigitaljakarta.com/cetak/>